

## ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK DAERAH DI KOTA TOMOHON

**Betsi Karolin Korowocyeng<sup>1</sup>, Jenny Morasa<sup>2</sup>, Dhullo Afandi<sup>3</sup>**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia  
Email: [betsikorowocyeng@gmail.com](mailto:betsikorowocyeng@gmail.com)*

### ABSTRAK

Peran akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan menjadi semakin penting untuk dunia usaha. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sangat memerlukan informasi ekonomi ini sebagai dasar menetapkan besarnya pajak yang terutang. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan akuntansi pajak daerah di Kota Tomohon apakah sudah memadai. Objek penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) di Kota Tomohon. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap transaksi pendapatan atas pajak daerah pada DPPKBMD dengan penerapan alur akuntansi mulai dari penjurnalan hingga pelaporan telah memadai karena telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan.

**Kata Kunci:** Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame.

### ABSTRACT

*The role of accounting as a financial information system is becoming increasingly important to the business world. For the government, especially the tax authorities are in need of economic information as the basis for determining the amount of tax payable. This study aimed to analyze the accounting treatment of local taxes in Tomohon whether adequate. The object of this study is the Department of Revenue, Finance and Regional Property (DPPKBMD) in Tomohon. The data used in this study are primary data and secondary data. The method used in this research is descriptive analysis. The results showed that the recognition of transactions on the local tax revenue in DPPKBMD with the application of accounting grooves ranging from journalizing to have adequate reporting for compliance with the provisions stipulated in Government Regulation No. 24 Year 2005 on the Financial Accounting Standards.*

**Keywords:** Entertainment Tax, Restaurant Tax, Advertisement Tax.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dipungut secara paksa tanpa mendapat jasa timbal balik. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Selain itu, pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan.

Peran akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan menjadi semakin penting untuk dunia usaha. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak sangat memerlukan informasi ekonomi ini yang digunakan sebagai dasar menetapkan besarnya pajak yang terutang. Walaupun demikian, masih diperlukan adanya penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga diperlukan adanya akuntansi yang khusus mengacu pada ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah juga terdapat dalam konteks akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Informasi yang dihasilkan adalah berupa laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan keuangan daerah.

Kota Tomohon merupakan kota yang cukup maju dengan penerimaan pajak daerah yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah setiap tahunnya, maka pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak memerlukan peran akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah perlakuan akuntansi pajak daerah (pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak reklame) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Kota Tomohon telah memadai?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi pajak daerah (pajak hiburan, pajak restoran dan pajak reklame) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di Kota Tomohon.

### Tinjauan Pustaka

Menurut (Djoko Muljono, 2009: 1) Akuntansi adalah urutan proses kegiatan *pencatatan, penggolongan, peringkasan* dan *penyajian* dengan cara tertentu atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi serta penafsiran terhadap hasilnya.

Akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undang perpajakan serta peraturan pelaksanaannya, disebut akuntansi pajak.

Menurut (Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, 2011: 28) pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45 bahwa tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut.

1. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen)
2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)
3. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
4. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan, dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kaferatia, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan..

Laporan keuangan pokok terdiri dari, sebagai berikut.

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas (LAK)
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Pengakuan pendapatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur pada lampiran II paragraf 88 sebagai berikut.

1. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
2. Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Penyajian dan pengungkapan pendapatan pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Penyajian pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran  
Berdasarkan PSAP No. 02, Laporan Realisasi Anggaran pada lembar muka laporan keuangan adalah klasifikasi menurut jenis pendapatan, yang dikelompokkan menurut pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Penyajian Pendapatan pada Laporan Arus Kas  
Penyajian pendapatan pada kelompok Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Laporan Arus Kas adalah berdasarkan PSAP No.03 tentang Laporan Arus Kas. Berdasarkan Paragraf 14 PSAP No. 03, Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.
3. Pengungkapan Pendapatan pada Catatan atas Laporan Keuangan  
Pada paragraf 13 PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, dikemukakan bahwa CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain sebagai berikut.
  - a. Informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
  - b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
  - c. Ikhtisar pencapaian target selama tahun pelaporan
  - d. Kebijakan akuntansi
  - e. Penjelasan laporan pos-pos keuangan
  - f. Penjelasan atas informasi non keuangan

### **Penelitian Terdahulu**

1. Ihwan Kema (2013) tentang Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Manado. Tujuan penelitian yaitu Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Manado apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kota Manado pada tahun 2011 dalam penyajian laporan keuangan belum mengacu pada SAP terlihat pada pos bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintah desa pada pos belanja serta biaya dibayar di muka pada aset lan, tetapi secara keseluruhan laporan keuangan pemerintah kota Manado telah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Vera Sri Endah Cicilia (2012) tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan penelitian adalah a) untuk menganalisa sistem akuntansi untuk belanja daerah dalam pemerintah Kabupaten Minahasa Utara; b) untuk mengevaluasi laporan mengenai belanja daerah dalam pemerintahan Kabupaten Minahasa utara; c) untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada belanja daerah pemerintah kabupaten Minahasa Utara telah berjalan sesuai dengan SAP yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlakuan akuntansi untuk realisasi belanja serta pencatatannya baik belanja langsung maupun tidak langsung sudah disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian komparatif yaitu membandingkan teori yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan praktek pencatatan, pengakuan, pelaporan dan pengungkapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Daerah yang berlokasi di Jl. Slanag (Kolongan) Tomohon, Sulawesi Utara. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai Mei Tahun 2015.

### Jenis Data

Terdapat dua jenis data, yaitu seperti berikut ini.

1. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam suatu skala numerik.
2. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur dalam suatu skala numerik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dengan menggunakan pendekatan induksi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan dari masalah yang ada melalui pengungkapan fakta.

### Sumber Data

Terdapat dua jenis sumber data, yaitu seperti berikut ini.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan survei pada objek penelitian menggunakan semua metode pengumpulan data.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

### Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang diperlukan, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu seperti berikut ini.

- a. **Interview (Wawancara)**  
Interview (wawancara) adalah kegiatan untuk mencari data dengan cara melakukan tanya jawab kepada berbagai pihak guna memperoleh data yang diperlukan
- b. **Dokumentasi**  
Dokumentasi adalah kegiatan mencari data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-laporan yang relevan dengan objek penelitian.
- c. **Studi Kepustakaan**  
Studi kepustakaan yaitu kegiatan memperoleh data dengan cara membaca/mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

### Metode Analisis

Dari data yang diperoleh, maka dilakukan analisis data agar dapat diinterpretasikan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan kemudian menjelaskan dan menganalisis lebih lanjut dan dibandingkan dengan konsep/teori yang relevan kemudian ditarik kesimpulan.

### Teknik Analisis

- Mengambil data berupa laporan keuangan yang dapat dijadikan dasar penelitian.
- Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam permasalahan yang ada.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pencatatan

**Tabel 1**  
**Jurnal Penerimaan Kas**

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit
28-jan-2013	001834/BP/1 2051/2013	1.20.05.01.00.00.	Kas di Bendahara	Rp 500.000	Rp 500.000
		1.1.1.02.01	Penerimaan		
		1.20.05.01.00.00 3.1.5.01.01	Pajak hiburan amazone <i>(Penerimaan Pajak Hiburan Amazone)</i>		
	8/BP/12051/2 013	1.20.05.01.00.00.	Kas di Bendahara	Rp 96.545.194	Rp 96.545.194
		1.1.1.02.01	Penerimaan		
		1.20.05.01.00.00. 3.1.5.01.01	Pajak restoran KFC Tomohon <i>(Penerimaan Pajak Restoran KFC Tomohon)</i>		
	000102/BP/1 2051/2013	1.20.05.01.00.00.	Kas di Bendahara	Rp 500.000	Rp 500.000
		1.1.1.02.01	Penerimaan		
		1.20.05.01.00.00. 3.1.5.01.01	Pajak reklame PT. Activity Cipta Bersama <i>(Penerimaan Pajak Reklame PT. Activity Cipta Bersama)</i>		

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon Tahun 2015

**Tabel 2**  
**Jurnal Penyetoran Kas**

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
28-Jan-2013	0011/STS/12 051/2013	1.20.05.01.00.00. 1.1.1.01.01 1.20.05.01.00.00. 1.1.8.01.01	R/K Pusat..... Kas di Bendahara Penerimaan (penyetoran kas yang berasal dari bendahara penerimaan)	Rp 99.000.000	Rp 99.000.000

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon Tahun 2015

### Analisis Sistem Pencatatan

Pada DPPKBMD pegakuan atas pendapatan dilakukan berdasarkan basis kas dimana pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening umum daerah. Dengan demikian, pada saat Kepala SKPD menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dokumen tersebut disampaikan kepada wajib pajak dan kepada Bendahara Penerimaan. Berdasarkan SKP tersebut, wajib pajak membayar pajak yang terutang kepada Bendahara Penerimaan. Kemudian Bendahara Penerimaan menyetorkan semua uang yang diterima menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank sebagai bukti penyetoran uang ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank. Setelah uang tersebut disetor, maka Bank akan menerbitkan Nota Kredit sebagai bukti adanya transfer ke rekening kas daerah.

Pencatatannya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah dalam penerimaan pendapatan untuk pajak daerah sudah memadai. Karena telah didasarkan pada STS sebagai bukti penyetoran uang ke Rekening Kas Umum Daerah dan penerbitan Nota Kredit dari bank sebagai bukti penerimaan uang ke Rekening Kas Daerah. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu bahwa pendapatan pengakuannya terjadi pada saat kas diterima ke rekening kas umum daerah (PSAP No.2 Paragraf 22).

Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah pencatatan yang dilakukan sudah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### Sistem Pelaporan Keuangan

#### Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

**Tabel. 3**  
**Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kota Tomohon Tahun 2012-2013**

Tahun	Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)
2012	3.524.759.217	2.591.318.111
2013	4.685.975.000	5.458.559.604

Sumber data : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD)  
Kota Tomohon Tahun 2015

### Neraca

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP No. 1 Paragraf 38 neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

### Laporan Arus Kas

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu PSAP Lampiran I Paragraf 85 dan 86 laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.

### Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil penelitian dalam lampiran, Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Barang Milik Daerah mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- Informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- Ikhtisar pencapaian target selama tahun pelaporan
- Kebijakan akuntansi
- Penjelasan laporan pos-pos keuangan
- Penjelasan atas informasi non keuangan

**Tabel 4.**  
**Tahun Anggaran 2012**

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi 2012 (Rp)	Anggaran 2012 (Rp)	Pencapaian %
Pajak Hotel/Penginapan	123.981.762	175.302.351	70,72
Pajak Restoran	666.683.743	785.009.706	84,93
Pajak Hiburan	4.000.000	15.000.000	26,67
Pajak Reklame	213.695.625	300.443.250	71,13
Pajak Penerangan Jalan	1.116.818.620	1.601.003.910	69,76
Pajak Parkir	1.300.000	15.000.000	8,67
Pajak Air Tanah	1.200.000	15.000.000	8,00
Pajak Sarang Burung Walet	-	15.000.000	0,00
Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam	48.000.000	203.000.000	23,65
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	415.638.361	400.000.000	103,91
<b>Jumlah</b>	<b>2.591.318.111</b>	<b>3.524.759.217</b>	<b>73,52</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon Tahun 2015



**Tabel. 5**  
**Tahun Anggaran 2013**

<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>Realisasi 2012 (Rp)</b>	<b>Anggaran 2012 (Rp)</b>	<b>Pencapaian %</b>
Pajak Hotel/Penginapan	85.216.000	150.975.000	56,44
Pajak Restoran	1.484.059.553	1.175.000.000	126,38
Pajak Hiburan	12.720.000	50.000.000	25,44
Pajak Reklame	337.228.375	390.000.000	86,47
Pajak Penerangan Jalan	2.506.827.515	2.110.000.000	118,81
Pajak Parkir	4.044.000	7.500.000	53,92
Pajak Air Tanah	943.125	2.500.000	37,73
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	0,00
Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam	69.635.000	200.000.000	34,82
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	956.986.036	600.000.000	159,50
<b>Jumlah</b>	<b>5.458.559.604</b>	<b>4.685.975.000</b>	<b>116,49</b>

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon Tahun 2015

#### **Analisis Sistem Pelaporan Keuangan**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon terdiri dari empat, yaitu sebagai berikut.

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Bentuk format pelaporan serta isi laporan yang dihasilkan SKPD oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan barang Milik Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kesesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Di dalam LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggarannya. Hal ini sesuai dengan PSAP 02 Paragraf 6.
- b. Laporan keuangan tersebut diterbitkan setiap tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan PSAP 02 Paragraf 11.
- c. Laporan keuangan yang dihasilkan diproses melalui SIMDA, baik pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan (input penjurnalan), sampai pada penyajian dalam bentuk laporan keuangan sebagai output. Kecuali untuk perhitungan pajak terutang, masih dihitung secara manual. Dan juga, SIMDA ini dijamin keandalannya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaporan untuk pajak daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon cukup memadai.

Pengungkapan atas rekening-rekening yang tercantum dalam laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas tercantum dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK yaitu seperti berikut.

- a. Informasi tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi

- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- c. Ikhtisar pencapaian target selama tahun pelaporan
- d. Kebijakan akuntansi
- e. Penjelasan laporan pos-pos keuangan
- f. Penjelasan atas informasi non keuangan

Dengan demikian, pengungkapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah (DPPKBMD) Kota Tomohon telah memadai.

#### 4. KESIMPULAN

1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon telah menggunakan pencatatan terkomputerisasi yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Pengakuan terhadap pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon dengan penerapan alur akuntansi yang berawal dari penjurnalan sampai pelaporan keuangan telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.
3. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah basis kas hal ini sesuai dengan PSAP 01 Paragraf 5. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon secara keseluruhan telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Muljono. 2009. *Akuntansi Pajak*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Andi
- Marihot Pahala Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009*. Edisi revisi. Jakarta: Rajawali Pers
- Pramono Hariadi, Yanuar E. Restianto, Icuk Ranga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Primadita Fitriandi, Yuda Aryanto, Agus Puji Priyono. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rudy Suhartono, Wirawan B. Ilyas. 2010. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Salemba Empat
- Wirawan B. Ilyas, Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta: Salemba

- Ihwan Kema. 2013. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Kota Manado. *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Vera Sri Endah Cicilia. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan). *Skripsi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado